

## HAK-HAK PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PT LIVATECH ELEKTRONIK INDONESIA)

Abdul Aziz Sholihin<sup>1</sup> Nindyo Pramono<sup>2</sup> Purman Hidayat<sup>3</sup>

Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan dan pelanggaran hak-hak pekerja Pt. Livatech Elektronik Indonesia di Kota Batam dan kendala pemenuhan hak-hak pekerja setelah PT. Livatech Elektronik Indonesia dibubarkan.

Penelitian ini ditujukan kepada serikat pekerja PT. Livatech Elektronik Indonesia, tim likuidasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemenuhan hak-hak pekerja PT. Livatech Elektronik Indonesia adalah masih tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun pelanggaran-pelanggaran hak-hak pekerja PT. Livatech Elektronik Indonesia adalah : upah pada bulan januari yang belum/tidak penuh diberikan oleh pengusaha kepada pekerja PT. Livatech Elektronik Indonesia, upah kepada pekerja selama belum adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak atas Jamsostek yang tidak dapat digunakan pekerja hingga adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan kendala pemenuhan hak-hak pekerja PT. Livatech Elektronik Indonesia dibubarkan yaitu : pengusaha yang mau diminta pertanggung jawaban sudah pergi dan tidak berada diwilayah Republik Indonesia yang tidak diketahui keberadaannya, tidak tercapainya kata sepakat karena berbeda pendapat antara pihak pengusaha dengan pekerja yang diwakili serikat pekerja, tidak adanya upaya *kooperatif* pihak pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan upaya Tim Mediator, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mendapat kepastian hukum berupa keputusan yang bersifat tetap dan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

**Kata Kunci:** Hak-hak pekerja, Pemenuhan hak-hak pekerja, Pelanggaran hak-hak pekerja, Kendala-kendala pemenuhan hak-hak pekerja setelah PT Livatech Elektronik Indonesia dibubarkan.

---

<sup>1</sup> DPRD Kabupaten Bintan Kepri

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**LABOR'S RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW  
NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING LABOR  
(CASE STUDY OF PT.LIVATECH ELECTRONIC  
INDONESIA)**

Abdul Aziz Sholihin<sup>1</sup> Nindyo Pramono<sup>2</sup> Purman Hidayat<sup>3</sup>

Magister Hukum Bisnis

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**ABSTRACT**

This research was made in order to figure out the implementation and offences to the rights of Pt. Livatech Elektronik Indonesia 's workers in city of Batam and all barriers to implement the workers' rights after the company closed down.

The research was meant to the union, Liquidation team, and Official of Labour in Batam

From this research, found that implementation of worker's rights still not as per Constitution No. 13 Year 2003 regarding Labour. The worker's rights was offended at the following point: Salary for month of January has never been paid by the company, worker's salary before completion of industrial relationship conflict process, worker's rights of Jamsostek (insurance) fund. Meanwhile, the barriers for implementation of the worker's right is: The company's owner was disappeared from Indonesia, no agreement between both side so far, the company side never cooperate with Mediator team, It takes time to reach the agreement and decision to this conflict.

**Keywords:** The worker's Rights, Implementation of the worker's right, Offences to the worker's right, Barriers to implement the worker's right after the company closed down.

---

<sup>1</sup> DPRD Kabupaten Bintan Kepri

<sup>2</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta

<sup>3</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta